

PEMIKIRAN POLITIK MAHBUB DJUNAIDI

Khoirul Huda¹, Katimin², Elly Warnisyah Harahap³,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: hudakhoirul338@gmail.com, katimin@uinsu.ac.id,
ellywarnisyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data tentang Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah menganalisis Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi dan Kritik Mahbub Djunaidi di masa Orde Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dan menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sejarah dan politik. Sumber data penelitian penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama: sumber data primer adalah data pokok sebagai kajian utama bersumber dari buku-buku karangan Mahbub Djunaidi sendiri: Dari Hari Ke Hari, Politik Tingkat Tinggi Kampus, Kolom Demi Kolom, Humor Jurnalistik, Mahbub Djunaidi Asal Usul. Kedua data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Antara lain sumbernya adalah berasal dari tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang ditulis orang lain tentang Pemikiran Mahbub Djunaidi. Mahbub Djunaidi mengkritik Orde Baru sebagai demokrasi itu bisa dibunuh di dalam lembaga demokrasi, dengan cara-cara yang demokratis. Mahbub Djunaidi mengkritik dengan tulisannya bergaya jenaka, humoris dan penuh dengan sindiran.

Kata Kunci: *Mahbub Djunaidi, Pemikiran, Demokrasi*

Abstract

This research is focused on obtaining data on Mahbub Djunaidi's Political Thought. The purpose of this research is in accordance with the formulation of the problem to analyze the political thought of Mahbub Djunaidi and the criticism of Mahbub Djunaidi in the New Order era. This research is a library research and uses qualitative data analysis, with historical and political approaches. The research data sources of this research consist of two types. First: primary data sources are basic data as the main study sourced from books written by Mahbub Djunaidi himself: From Day to Day, Campus High-Level Politics, Column by Column, Journalistic Humor, Mahbub Djunaidi Origins. The two

secondary data are supporting data obtained from various other literatures that are relevant to the topic being studied. Among other things, the sources come from writings in the form of books, journals, and articles written by other people about Mahbub Djunaidi's thoughts. Mahbub Djunaidi criticized the New Order as a democracy that could be killed in democratic institutions, by democratic means. Mahbub Djunaidi criticized his writing in a humorous, humorous and full of satire style.

Keywords: *Mahbub Djunaidi, Thought, Democracy*

PENDAHULUAN

Mahbub Djunaidi merupakan seorang tokoh dengan salah satu karakter politiknya yang unik, cerdas dan banyak memberikan kontribusi pemikiran bagi tumbuhnya proses demokratisasi di Indonesia. Mahbub Djunaidi dikenal sebagai wartawan, sastrawan, agamawan, organisatoris, kolumnis dan politikus, serta predikat baik lainnya yang disematkan kepadanya. Mahbub Djunaidi lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1933, dan wafat di Bandung 1 Oktober 1995. Tulisannya banyak mengandung unsur kritik sosial yang tajam dan mendalam ditujukan kepada pemerintah Orde Baru pada saat itu, seperti tulisan yang berjudul *Parlemen* yang dilansir di media Kompas pada tanggal 12 Mei 1991 “*Pers pada umumnya menganggap parlemen itu bisu dan tidak nyinyir. Ia diam saja, sedekap tangan ketika penduduk menerima macam-macam perkara. Ia berdiri tegak lurus ketika rakyat digusur dan harus pindah ke tempat lain. Ia terpejam ketika menghadapi anggaran belanja yang disodorkan pemerintah. Ketimpangan ini mengakibatkan parlemen tidak lagi berfungsi sebagai pengawas pemerintah melainkan sekedar jadi legislator atau alat pengukuh bagi tiap kehendak pemerintah.*”¹ Pemerintahan Orde Baru berwatak otoritarian dan represif dalam menjalankan sistem pemerintahannya, hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.²

Mahbub Djunaidi sebagai seorang kolumnis, ketika menyampaikan gagasan-gagasannya memiliki ciri khas tersendiri, terutama berkaitan dengan demokratisasi. Tulisannya bergaya jenaka, humoris dan penuh dengan sindiran misalnya tulisan yang berjudul *Kutu Loncat*, dilansir di media Kompas pada tanggal 25 Agustus 1991, “*jangan pindah partai semudah menukar baju yang tidak sesuai lagi dengan mode. Karakter seperti itu bukan politisi yang baik*”. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai pendekar pena, karena mampu membuat pembaca tertawa ketika membaca tulisannya, serta menjelaskan persoalan serius yang tengah terjadi di masyarakat dengan bahasa sederhana dan perumpamaan. Hal tersebut diakui oleh Gunawan Muhammad bahwa tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi

¹Mahbub Djunaidi, *Asal Usul*, (Jakarta: Harian Kompas, 1996), 332

²Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001), 50

sangat mudah dipahami dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pernah membosankan karena selalu tidak terduga.³

Minat Mahbub Djunaidi di bidang politik dan keorganisasian sudah muncul ketika ia menginjak remaja. Ketika berusia 19 tahun, ia menjabat Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kariernya dalam organisasi terus meningkat dengan keberhasilan ia menjabat Ketua Umum Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1960-1967, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai puncak kariernya, Mahbub Djunaidi diangkat menjadi Wakil Sekjen Nahdlatul Ulama (NU) dan Wakil Ketua I PBNU periode 1970-1979 dan 1984-1989. Selain itu, partai NU juga menunjuk Mahbub Djunaidi sebagai wakil di DPR periode 1977-1982. Aktif dalam bidang politik dan keorganisasian, Mahbub Djunaidi juga memiliki karir dalam bidang jurnalistik. Karirnya dalam bidang jurnalistik itu makin berkembang setelah ia menjabat Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat 1960-1970.⁴

Sepanjang perjalanan hidupnya, Mahbub Djunaidi sering melontarkan gagasan- gagasannya terkait dengan demokrasi di Indonesia. Menurutnya proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu gagasannya secara tertulis berjudul *Demokrasi: Martabat dan Ongkosnya* yang dimuat di koran Tempo pada tahun 1972. Potret demokrasi bagi Mahbub dalam tulisan tersebut, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Persoalan tersebut ditanggapi secara tegas oleh Mahbub dan dikatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan idealnya anggaran negara harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perjuangan Mahbub dalam membuka “kran” kebebasan ruang demokratisasi di Indonesia berujung pemenjaraan pada tahun 1978, karena Mahbub mengkritik keras sistem demokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Mahbub Djunaidi juga terlibat di politik elektoral di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dicalonkan dari Timur Leste, dan sering keluar masuk kampus untuk mengisi dialog dan diskusi mahasiswa.⁵

³ Mahbub Djunaidi, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), 5

⁴ Iwan Rasta Isfandiari, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 391

⁵ Iwan Rasta Isfandiari, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*,... 220

Pemikiran Mahbub Djunaidi

Pemikiran Mahbub Djunaidi yang menjadi pembahasan penting dalam Konbes 15-18 Nopember 1987 di Cilacap menuai pro dan kontra dikalangan NU. Dukungan terhadap Khittah Plus datang dari politisi NU yang menginginkan kembali terjun kedalam masalah politik praktis. Sedangkan kubu yang menolak adalah para tokoh NU yang ingin mengembalikan NU ke garis perjuangan dengan keputusan Khittah 1926 karena pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh NU selama menjadi partai politik.⁶

Latar belakang pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus ini muncul ketika melihat keputusan muktamar NU di Situbondo yang menginginkan NU melepaskan keterkaitan dari dunia politik secara organisatoris. Mahbub Djunaidi beranggapan bahwa politik adalah jalan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Karena melihat definisi politik secara singkat adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik.

Selain ketidaksetujuan Mahbub terhadap hasil keputusan Khittah NU 1926 pada Muktamar Situbondo, adapula beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Mahbub tentang Khittah Plus atau Politisasi NU. Diantaranya adalah:

a. Urusan Politik Pasca-Khittah NU

NU memang tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik, karena memang sejak tahun 1952 NU yang mengganti baju dari jam'iyah keagamaan menjadi sebuah partai politik. Budaya politik sudah mengakar kuat dalam tubuh NU dan para tokoh-tokohnya. Tahun 1984 menjadi momentum yang penting oleh NU karena mengembalikan jamiyah NU ke garis perjuangan yang disebut Khittah NU 1926.⁷ Dalam keputusan Khittah NU 1926 yang dideklarasikan di Muktamar Situbondo adalah meninggalkan politik praktis secara organisatoris dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Surat Keputusan dari PBNU tahun 1985 yang isinya melarang pengurus harian NU merangkap jabatan di partai politik.⁸

Meski sudah ada rambu-rambu larangan untuk merangkap jabatan tetapimasih kalah dengan keinginan para tokoh NU untuk tetap berpolitik. Banyak tokoh-tokoh NU yang dalam struktural masuk dalam pengurusan NU juga masih masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik, utamanya di PPP. Seperti H. Imron Rosyadi, H. Imam Afwan, Kiai Syansuri Badawi dan beberapa tokoh NU lainnya. Untuk tetap menjaga kenetralan politik

⁶Said Budairy, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik Dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2015), 25

⁷Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 40

⁸Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bima Satu, 1999), 191

yang dipegang oleh NU pasca-Khittah 1926 dilakukanlah aksi penggemosan di wilayah yang basis NU-nya sangat besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dilakukan oleh H. Mabbub Djunaedi, H. M. Yusuf Hasyim, H. Syafii Sulaiman, KH. Sohib Bisri, H. Hasyim Latief, KH. Imron Hamzah dan beberapa nama kiai lainnya. Dengan tujuan untuk meyakinkan pemerintah bahwa NU sudah benar-benar netral dan sudah tidak ada kaitannya dengan PPP.⁹

Aksi penggemosan terhadap PPP justru menguntungkan partai Golkar dan PDI. Dalam kajian *Bahsul Massail* yang dilakukan oleh para tokoh NU se-DIY sangat menguntungkan partai Golkar karena dirasa mampu paling mampu membawa manfaat bagi bangsa dan umat islam di Indonesia.¹⁰

Sampai akhirnya ada pula fatwa-fatwa para Kiai yang mengharamkan memilih PPP dalam pemilu melalui pengajian-pengajian ataupun selebaran. Hal itu mengakibatkan perpecahan dalam tubuh NU karena NU yang menyatakan diri netral dari partai politik manapun malah melakukan aksi penggemosan dan malah mendukung Golkar. Memang budaya politik di NU uda mengakar kuat, meskipun adanya Khittah NU 1926 dan beberapa peraturan tetap saja para tokoh NU masih menginginkan untuk terus berpolitik.¹¹

b. NU dijadikan Alat untuk Mendulang Suara

Kebebasan warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik yang diinginkan ternyata malah menimbulkan kegamangan politik. Hal itu tentu diakibatkan oleh fatwa-fatwa yang di lontarkan para tokoh NU dalam upaya mengurangi dan menambahi suara untuk partai politik tertentu. Keadaan telah melanggar hak berpolitik bagi warga NU yaitu:

1. Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bukanlah wadah kegiatan berpolitik praktis. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundangan, sehingga tercipta budaya politik yang sehat.
2. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama:
 - a. Menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh.

⁹Prafnia Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*, (Surabaya. KDRD, 2013), 91

¹⁰Kristanto, *Mabbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001), 27

¹¹Faishal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 200

- b. Memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politik melalui organisasi politik pilihannya itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam.

Kebebasan memilih warga NU masih disetir oleh para tokoh yang masih terlibat dalam dunia politik. NU yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia dalam setiap pemilu hanya dijadikan alat untuk mendulang suara. Nu hanya dijadikan tarik-ulur oleh partai-partai politik guna mendapatkan masa dan dukungan oleh NU engan berbagai iming-iming jabatan dan kesejahteraan.

Mahbub menjelaskan, ia tidak bisa membayangkan warga NU yang sekitar 20 jutaan pada tiap pemilu hanya berdiri di luar pagar dan cukup terbatas pada tukang beri suara. Mahbub merasa yakin masih banyak warga NU yang menginginkan ormas keagamaan ini menjadi parpol lagi jika keadaanmemungkinkan.¹²

Hal yang serupa juga oleh Mahbub Djunaidi di tulis dalam majalah tempo ketika berdialog dengan Cholid Mawardi yang waktu itu di isukan menjadi ketua umum PPP yang isinya: “Andai kata betul anda jadi ketua umum PPP, apa bukan maksudnya supaya warga NU kembali mendukung partai yang sudah keropos karena digembosi itu? Kedengarannya kok jadi lucu dan tidak etis. Apa ini bukan berarti menjilat ludah kembali? Taruhlah itu cuma orang-orang NU secara pribadi, sedangkan NU sendiri tetap sebagai ormas nonpolitik tidak kesana dan tidak kesini. Tapi, bukankah masih juga kocak: siang jadi PPP, dan malamnya jadi NU? Apa bukan membingungkan orang NU kepalanya jadi dua? Bersikap ganda dan ambivalen terus menerus pastilah kurang bagus untuk pencernaan, bisa bikin mencret. Dari pada NU sekarang ini melayang-layang diluar sistem politik resmi, bagaimana kalau kembali saja jadi partai politik lagi? Apa bukan lebih baik begitu daripada tiap pemilu jadi perawan yang ditarik kian kemari oleh para kontestan? Orang tentu bisa juga bilang NU itu menjilat ludahnya kembali. Bagaimana kalau mnggunakan kalimat yang lebih halus: NU senantiasa melakukan *Think and Rethink*.”¹³

Dari ketidak jelasan sikap NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya yang membuat NU hanya dijadikan alat untuk mendulang suara bagi partai yang berhasil menarik hati tokoh NU dan Warganya, hal inilah yang membuat Mahbub Djunaidi mempunyai gagasan

¹² Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mabbub Djunaidi*,.....h,59

¹³ Djunaidi, Mahbub, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), 102

Khittah Plus yang dijelaskan dalam Konbes/Munas di cilacap sebagai pembahasan utama.

c. Politik Satu-satunya Cara Mencapai Tujuan

Mahbub Djunaidi dan politik memang tidak bisa dipisahkan, karena dari ayahnya H. Djunaidi yang pernah berjuang dalam bidang politik dengan menempati posisi sebagai DPR hasil pemilu 1955. Sedangkan Mahbub Djunaidi juga merupakan seorang politik yang pernah menjadi DPR-GR/MPRS dari fraksi NU tahun 1960 dan dari fraksi PPP tahun 1977.¹⁴

Menurut Mahbub kondisi masyarakat muslim di Indonesia dalam pelaksanaan syariat keagamaan dapat dikatakan menggembirakan, namun dari sikap politik masih memprihatinkan. Inilah yang menurut Mahbub salah satu kekurangan umat Islam di Indonesia. Sekarang ini, tidak ada satupun organisasi Islam yang terang-terangan membenderakan dirinya sebagai partai politik Islam. Dengan keadaan seperti ini, sangat kecil kemungkinan aspirasi politik Islam tersalurkan.

Ketika NU ikut dalam politik praktis, NU sudah menjadi langganan untuk duduk di kementerian dan ikut mempengaruhi keputusan pemerintahan. Seperti KH. Abdul Wahid Hasyim sebagai menteri agama pertama, kemudian ada nama KH. Masykur, Fahrurrahman Kafrawi, KH. Saifuddin Zuhri dan tokoh lain yang masuk dalam kementerian. Dalam perkembangannya pada 9 April 1957 presiden Soekarno membentuk kabinet yang bernama kabinet karya, dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri, Mr. Hardi, Idham Chalid dan Leimena, masing-masing menjadi wakil perdana menteri I, II dan III. Selain Idham Chalid, dari partai NU juga ditunjuk KH. M. Ilyas sebagai menteri agama, Mr. Sunaryo sebagai menteri agraria, Prof. Drs. Sunaryo sebagai menteri perdagangan.¹⁵

Kemudian kabinet karya inipun mengalami perubahan, yakni tambahan KH. M. Wahib Wahab sebagai menteri urusan kerjasama sipil-militer dan Prof. Drs. Sunaryo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Brazilia, sedangkan jabatan semula digantikan oleh Rahmat Mulyoamiseno. Pada tahun 1966, NU masih memegang peranan penting dalam pemerintahan dengan terpilihnya Subhan ZE sebagai wakil ketua MPRS (1966- 1971) dan A. Sjaichu sebagai ketua DPR-GR. Perjuangan NU masih berlanjut dalam bidang politik. Banyak politisi NU yang berhasil menduduki kursi pemerintahan.¹⁶

Keterlibatan tokoh NU yang berjuang di arena politik dengan mempertahankan posisi strategis dalam pemerintahan bertujuan untuk

¹⁴ Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mabbub Djunaidi...*, 71

¹⁵ Kristanto, *Mabbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001), 1

¹⁶ Kristanto, *Mabbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern...*, 41

memudahkan jalan NU dan memperjuangkan kepentingan NU dalam pemerintahan dengan menjalin komunikasi yang kuat bukan hanya dari kalangan ulama melainkan dari semua kalangan. Dengan terus terlibatnya NU dalam pemerintahan, cita-cita NU dan umat Islam akan memudahkan untuk mencapai tujuan karena menurut Mahbub Djunaidi politik merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Tanpa harus dibatasi oleh keputusan Khittah NU 1926 yang melarang untuk ikut berpolitik praktis.¹⁷

Pandangan Mahbub Djunaidi Tentang Khittah NU

Adanya keputusan Khittah NU menimbulkan banyak penafsiran-penafsiranyang tidak sesuai dengan sesuka hati, ada yang menganggap bahwa Khittah NU merupakan penarikan diri dan meninggalkan segala macam politik. Adapula yang menafsirkan bahwa adanya Khittah adalah langkah melepaskan diri dari PPP dan berganti memberikan dukungan partai dengan alasan kekecewaan terhadap PPP. Pengertian Khittah yang sebenarnya disebutkan dalam keputusan Mukhtamar XXVII NU No.:02/MNU-27/1984, yang isinya:

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindakwarga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa

Setelah Mukhtamar ke-27 di Situbondo merupakan langkah awal untuk meninggalkan segala macam politik praktis dan menyatakan netral dari golongan partai politik manapun. Intinya secara organisatoris NU tidak terikat dengan partai politik tetapi secara perseorangan boleh melakukan praktik politik untukmendukung salah satu partai yang sesuai. Misalnya saja dalam soal perangkapan jabatan, Mukhtamar menyerukan: Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas organisasi, maka kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak dirangkap dengan kepengurusan harian organisasi politik manapun.

Meskipun sudah ada larangan perangkapan jabatan dalam NU dan partai politik dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PBNU No. 01/PBNU/I-1985. Tetap saja banyak tokoh elit NU yang tetap duduk di PPP seperti, H. Imron Rosadi, H. Imam Sofwan, Kiai Syansur Badawi dan

¹⁷Martin Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), 20

tokoh-tokoh lainnya. Hal ini menandakan bahwa syahwat politik warga NU masih kuat meski sudah ada “Rambu-rambu” tentang Khittah NU 1926. Ketika NU dalam upaya pemantapan Khittah NU dan mengatasi permasalahan yang timbul setelah adanya Khittah NU, muncul pula gagasan agar NU kembali berpolitik praktis, gagasan tersebut dikemukakan oleh H. Mahbub Djunaedi yang lebih dikenal dengan istilah “*Khittah Plus*”. Isu ini muncul menjelang dilaksanakannya Munas Alim Ulama di pondok pesantren Itha’ Ulummudin Kesugihan, Cilacap, 15-18 Nopember 1987.¹⁸

Ide yang dilontarkan Mahbub merupakan ketidaksetujuan terhadap hasil Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo tentang kembali ke Khittah dan meninggalkan segala macam politik praktis. Pada prinsipnya H. Mahbub Djunaedi menginginkan adanya koreksi terhadap hasil-hasil Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984, yang memutuskan kembalinya NU ke Khittah 1926, berarti melepaskan diri dari urusan politik praktis dan hanya mengkhususkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan. Kacung marijan dalam bukunya menyebutkan dasar pikiran Mahbub adalah karena NU memiliki anggota yang relatif besar, sekitar 20 juta. Karena itu semestinya NU tidak bisa berdiri di luar pagar dan cukup terbatas dengan hanya tukang memberi suara saja. Dengan anggota yang banyak dan politisi NU yang sudah memiliki banyak pengalaman memungkinkan NU untuk kembali menjadi partai politik atau setidaknya mendukung salah satu partai yang bisa menampung aspirasi warga NU.¹⁹

Mahbub Djunaedi mengungkapkan idenya tentang Khittah Plus tersebut dalam majalah yang isinya sebagai berikut:

“Apa pikiran NU kembali jadi partai itu sebuah penyimpangan mendasar dari Khittah 1926? Tidak perlu begitu. Tarublah sekadar “Khittah Plus”. Toh asal mula Khittah tak lebih dan tak kurang dari kekecewaan terhadap pimpinan NU periode sebelum Mukhtamar situbondo yang dianggap mengabaikan urusan pendidikan dan sosial yang ditambah dengan rasa sakit hati terhadap perlakuan PPP”²⁰

Khittah Plus merupakan pemikiran yang kontroversial dikalangan NU. Pemikiran dari Mahbub Djunaedi ini berusaha ditentang oleh beberapa ulama seperti KH. Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena akan mempengaruhi proses kembalinya NU ke Khittah NU 1926. Khittah Plus muncul sebagai pewarna dari perjalanan panjang NU dalam urusan politik. Karena kurun waktu yang panjang pula objektifitas pemikiran tentang Khittah Plus malah sering digunakan dalam urusan politik warga NU.²¹

¹⁸ Abdul Chalik, *Nabdatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Pital, 2011), 88

¹⁹Kacung Marijan, *Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Pustaka: Eureka 2006), 315

²⁰Mahbub Djunaedi, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), 201

²¹Evi Vivit Puspitasari *Mahbub Djunaedi: Study Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970*, (Bandung: PT. Miza 2011), 38

Mahbub Djunaidi sadar bahwa mengembalikan NU menjadi partai politik memang sulit, apalagi dengan adanya benturan dengan para kiai. Tetapi, Mahbub yakin sesuatu yang sulit belum tentu Mustahil untuk terjadi dengan melihat perkembangan sistem politik di Indonesia. Karena ketika NU tidak mengambil sikap antara berhenti dari politik praktis secara organisatoris atau sebaliknya NU akan dijadikan tarik ulur untuk menjulang suara bagi partai yang ikut dalam pemilu,

Lebih lanjut Mahbub menjelaskan dalam majalah Tempo bahwa keputusan Khittah NU tidak selamanya bersifat objektif dan memiliki sifat dinamis, yang isinya sebagai berikut:

Apa yang objektif benar diputuskan Mukhtar Situbondo tahun 1984 belum tentu objektif benar untuk selama-lamanya? Bukankah mobilitas masyarakat perlu diperhitungkan? Bukankah *Status Quo* sesuatu yang tidak permanen? Bilamana kondisi obyektif berubah, bukankah boleh-boleh saja NU sendiri melakukan perubahan terhadap pendapatnya sendiri yang pernah dikeluarkan? Bukankah di bidang hukum ada *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*? Apa bukan begitu itu yang namanya dinamis?

Mahbub membandingkan keadaan pasca-Khittah NU dengan era tahun 1960-an dan 1970-an, ketika NU masih berdiri menjadi partai. Massa NU begitu besar, menguasai dimana-mana, keanggotaan Nu tidak hanya terdiri dari kaum Ulama saja, tetapi juga meliputi para guru, pejabat pemerintahan, nelayan, seniman, bahkan olahragawan. Kesemuanya itu membuat barisan Nahdlatul Ulama menjadi sangat panjang dengan medan perjuangan yang otomatis menjadi sangat luas. Menurut Mahbub, meskipun NU berbentuk partai politik, urusan-urusan seperti pendidikan (*Maarif*), sosial (*Mabarrot*), dakwah dan muammalah tetap memperoleh porsi perhatian yang tak kalah besar. Berlangsungnya Konbes Cilacap tahun 1987, Khittah Plus merupakan topik utama dalam pembahasan. Khittah Plus sendiri sebenarnya mendapatkan banyak dukungan dari para politisi dan tokoh muda NU yang menginginkan sebuah kejayaan sewaktu menjadi partai politik dan keinginan untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan.²²

Selain pembahasan tentang Khittah Plus NU adapula pembahasan untuk menggulingkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dengan digantikan Yusuf Hasyim. Politisi NU yang mendukung Khittah Plus atau Politisasi NU menganggap ketika Abdurrahman Wahid lengser akan membawa NU kembali ke jalur politik dan bahkan akan menjadi partai politik. Upaya menggulingkan ini dilakukan oleh para politisi NU dengan berbagai alasan terutama masalah model kepemimpinan dan usia yang terlalu muda untuk memimpin NU.

²² Farhan, *Mahbub Djunaidi: Aktivist Politik Nahdlatul 'ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008), 55

Upaya untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid dalam Konbes Cilacap tidak berhasil karena memang tidak dibenarkan dalam AD/ART. Dukungan dari Rais Aam PBNU KH. Achmad Siddiq juga sangat berpengaruh karena berhasil meyakinkan warga NU bahwa Abdurrahman Wahid masih bisa dan mampu untuk terus memimpin NU. KH. Achmad Shiddiq juga berhasil menggagalkan politisasi NU (keinginan untuk terus menggeluti urusan politik) dengan tetap konsisten dengan keputusan muktamar Situbondo.²³

KH. Achmad Siddiq beserta orang-orang yang setuju dengan “depolitisasi NU (setuju NU melepaskan diri dari kegiatan politik) telah berhasil menggagalkan upaya kelompok yang menginginkan politisasi NU, kelompok depolitisasi NU bertekad bulat untuk mengamankan keputusan Mukhtar Situbondo dan tetap mempertahankan Abdurrahman sebagai Ketua Umum PBNU.

Kharisma yang dimiliki KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam PBNU dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus cucu dari pendiri NU sangat luar biasa dengan berhasil mempertahankan Khittah NU 1926. Meski sempat memanas akhirnya keinginan Mahbub untuk menjadikan NU sebagai partai politik harus gugur. Selain karena berbenturan terhadap para tokoh NU sendiri pemikiran Mahbub tersebut juga berbenturan dengan undang-undang partai politik yang hanya membolehkan dua partai dan Golkar.²⁴

Akhirnya dalam konbes itu juga ditegaskan, dengan adanya keputusan itu PBNU menganggap selesai persoalan perbedaan pandangan yang ada. Selanjutnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PBNU akan selalu berpedoman kepada keputusan-keputusan formal organisasi sebagaimana dihasilkan Mukhtar NU 1984 dan Munas/Konbes NU 1987. Meskipun demikian, setelah berakhirnya Konbes Cilacap, tidak ada perasaan benci satu dengan yang lainnya. Abdurrahman Wahid menghargai pendapat Mahbub dan menyadari terkait perbedaan pendapat yang muncul. Akhirnya keputusan untuk tetap mempertahankan hasil Mukhtar Situbondo dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat NU tanpa adanya perpecahan.²⁵

a. Proses Khittah Plus dalam Tubuh NU

Perjalanan NU memang tidak pernah bisa dipisahkan dari politik. Mulai dari awal kelahiran NU sampai saat ini. Politik bagi warga NU

²³ Chalik, Abdul. *Nabdlatul Ulama dan Geopolitik Perubaban dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Pital, 2011), 70

²⁴ Prafania Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*, (Surabaya. KDRD, 2013), 39

²⁵ Prafania Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*,..., 50

merupakan sebuah tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Hal itu karena dari awal NU yang dianggap dari kalangan tradisional dan berangkat dari pesantren yang dianggap hanya mampu sebagai “guru ngaji”, NU ingin membuktikan bahwa NU mampu untuk ikut berpolitik dan agar tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah. Bahkan tokoh penting dalam jajaran NU, KH. Wahab Hasbullah mempunyai pendirian bahwa melalui politik bisa melindungi dan menjamin baik kepentingan NU maupun umat Islam pada umumnya.²⁶

Setelah NU melaksanakan Mukhtar ke-27 disitubondo yang menghasilkan keputusan NU kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah awal NU untuk lepas dari politik praktis yang pernah digeluti NU baik sebagai partai NU maupun di PPP. Berselang tiga tahun, tepatnya pada Konbes NU di Cilacap tahun 1987 muncul kembali pemikiran untuk NU kembali menjadi partai politik kembali, pemikiran ini muncul dari Mahbub Djunaedi yang sering disebut dengan Khittah Plus. Meskipun bisa dihalang-halangi oleh para kiai yang tetap menginginkan kembalinya NU ke Khittah 1926 dan berhasil mempertahankan keputusan Khittah NU 1926. Tetapi pemikiran Mahbub Djunaedi mempunyai dampak yang besar terhadap NU.²⁷

b. Penegasan Identitas NU Pasca-Khittah 1926

Pasca-Khittah NU, muncul dua kubu yang saling bertentangan antara kelompok yang mendukung Khittah 1926 dan kubu politisi NU yang menginginkan NU tetap menjadi partai politik sendiri. NU yang menyatakan kenetralan politik terhadap partai politik manapun ternyata tidak terbukti. Aksi pengembosan di PPP dan menguntungkan partai Golkar dengan fatwa haram mencoblos PPP merupakan keterlibatan para Kiai NU yang masih menaruh dendam terhadap PPP khususnya kepada Naro.²⁸

Terjadinya perpecahan dalam NU yang terjadi membuat para pimpinan NU merasa terganggu dengan upaya tarik menarik terhadap makna Khittah. Pemahaman politik warga NU agaknya telah mengalami redefinisi, kalau sebelumnya lebih menjurus kepada keterlibatan secara organisatoris, didalam *power-game*, maka setelah kembali ke Khittah 1926 secara konsepsional politik NU lebih diartikan sebagai keterlibatan organisasi ini dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.²⁹

Upaya untuk mempertegas identitas NU pasca-Khittah dan upaya menghentikan tarik menarik antara kedua kubu maka perlu adanya

²⁶ Thoah Hamim, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, (Surabaya: Diantama 2004), 29

²⁷ Thoah Hamim, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer...*, 33

²⁸ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu 1999), 50

²⁹ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU, ...*, 53

pedoman bagi warga NU untuk menggunakan hak-haknya dalam berpolitik yang dirumuskan pada Mukttamar ke-8 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989.³⁰ Yang isinya adalah:

1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperoleh konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan *akhlakul karimah* sebagai pengalaman sejarah Islam *Ahlussunah Waljama'ah*.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *Tawadlu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuannya di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi

³⁰ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/79490/perjuangan-nu-kembali-ke-khittah-1926>

kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.³¹

Pedoman berpolitik yang disebutkan di atas memiliki arti bahwa tidak ada batasan bagi warga NU untuk berpolitik, karena dengan sikap netral akan memperluas jangkauan politik NU dan bebas untuk memilih dan masuk ke partaidalam pemilu yang dilaksanakan tanpa harus menjadi partai politik.

c. Peluang Politisi NU untuk Tetap Berpolitik Praktis

Kebebasan warga NU dalam memilih dan masuk ke dalam partai politik, dan bahkan mendukung warganya aktif dalam organisasi politik membuat perpecahan dalam tubuh NU. Mahbub Djunaedi yang mempunyai gagasan Khittah Plus atau ingin menjadikan NU sebagai partai politik adalah sebagai satu-satunya aspirasi bagi warga NU.³²

Artikulasi Khittah NU 1926 yang melarang warga NU untuk terlibat politik praktis secara organisatoris ternyata tidak sesuai dengan konsep. Pertama, masuknya KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi MPR dan ketua umum PBNU dan Slamet Effendi Yusuf yang menjadi Departemen Pemuda DPP Golkar padahal ia adalah ketua GP-Ansor. Kedua, pada Mukhtar PPP ke-2 berhasil menggulingkan Naro mengisi posisi strategis yakni H. Matori Abdul Djalil menjadi Sekjen dan beberapa politisi NU lainnya yang menjadi anggota.³³

Dengan banyaknya tokoh NU yang masuk kembali dalam jajaran PPP ada indikasi bahwa PPP akan menjalin hubungan lagi dengan NU dan beberapa kali melakukan rekonsiliasi agar NU bisa mendukung PPP dalam pemilu 1992. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh NU dalam melaksanakan politik masih menggunakan simbol NU yang dalam semboyan politik NU. “NU tidak ke mana-mana tapi NU ada di mana-mana”, sudah menyalahi aturan. Geliat politik NU dalam PPP terus berlanjut pada Mukhtar PPP tahun 1994. Pada Mukhtar tersebut sejumlah tokoh NU menyatakan dengan tegas ingin mengambil alih kepemimpinan di PPP. NU yang sudah terlepas dari PPP sejak Mukhtar ke-27 di Situbondo malah dengan getol dan semangat untuk mengisi formatur kepengurusan PPP dengan orang-orang NU.³⁴

Secara sederhana ada dua faktor yang menjadi alasan kenapa NU

³¹Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Statuten Perkoempulan nahdlatuol ulama 1926* (Surabaya :PBNU 1930), 40

³²Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: lajnah babtsul masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS 2004), 201

³³Sjadzili, Khomami Zada, Fawaid, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Kompas 2010), 210

³⁴Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000),78

tergoda untuk tampil ke arena politik. *pertama* menguatnya “Formalisme” di kalangan pergerakan Islam. Bagi NU pendukung Khittah, formalisme pandangan yang menganggap bahwa golongan Islam harus mempunyai wakil resmi dalam struktur politik dalam kepolitikan Islam adalah suatu *Set-back*. NU tampaknya prihatin dengan kecenderungan tersebut. *Kedua* sebagai organisasi masa Islam yang merasa pernah tampil dengan peringkat kedua pada pemilu 1971, NU tampaknya merasa “ditinggalkan” dalam pengelolaan isu di sekitar relasi Islam dan negara.³⁵

Dengan adanya faktor tersebut menandakan bahwa memperjuangkan umat Islam dalam jalur politik harus mempunyai wakil dalam pemerintahan hal serupa juga yang menjadikan landasan berpikir Mahbub Djunaidi dalam gagasannya mengenai Khittah Plus yang beranggapan bahwa dengan berpolitik adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat dipaparkan bahwa kesimpulan dalam penelitian tentang Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi yang melatar belakang pemikiran Mahbub Djunaidi dalam politik, jurnalis dan Kritik Mahbub Djunaidi di masa orde baru adalah:

a. Politikus

Minat Mahbub Djunaidi di bidang politik dan keorganisasian sudah muncul ketika ia menginjak remaja. Ketika berusia 19 tahun, ia menjabat Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kariernya dalam organisasi terus meningkat dengan keberhasilan ia menjabat Ketua Umum Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1960-1967, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai puncak kariernya, Mahbub Djunaidi diangkat menjadi Wakil Sekjen Nahdlatul Ulama (NU) dan Wakil Ketua I PBNU periode 1970-1979 dan 1984-1989. Selain itu, partai NU juga menunjuk Mahbub Djunaidi sebagai wakil di DPR periode 1977-1982. Aktif dalam bidang politik dan keorganisasian, Mahbub Djunaidi juga memiliki karier dalam bidang jurnalistik. Karirnya dalam bidang jurnalistik itu makin berkembang setelah ia menjabat Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat 1960-1970.

Sepanjang perjalanan hidupnya, Mahbub Djunaidi sering melontarkan gagasan-gagasannya terkait dengan demokrasi di Indonesia. Menurutnya proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu gagasannya secara tertulis berjudul *Demokrasi: Martabat dan Ongkosnya* yang dimuat di koran Tempo pada tahun 1972. Potret demokrasi bagi Mahbub

³⁵Sjadzili, Khomami Zada, Fawaid, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan...*, 115

dalam tulisan tersebut, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan tersebut ditanggapi secara tegas oleh Mahbub dan dikatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan idealnya anggaran negara harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perjuangan Mahbub dalam membuka “kran” kebebasan ruang demokratisasi di Indonesia berujung pemenjaraan pada tahun 1978, karena Mahbub mengkritik keras sistem demokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Mahbub Djunaidi juga terlibat di politik elektoral di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dicalonkan dari Timur Leste, dan sering keluar masuk kampus untuk mengisi dialog dan diskusi mahasiswa.

b. Jurnalis

Mahbub Djunaidi lahir dari keluarga yang juga aktif dibidang politik. Mahbub Djunaidi adalah anak pertama dari 13 bersaudara pasangan dari H. Djunaidi dan ibu Muchsinati. Ayahnya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah menjadi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. Ayahnya juga sebagai kepala biro peradilan pada kementerian agama yang setiap awal bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri mengumumkan hasil rukyah melalui radio.

Mahbub Djunaidi yang lahir pada saat Indonesia masih dalam masa penjajahan harus ikut merasakan kesengsaraan akibat kebijakan-kebijakan Belanda. Akibatnya, Mahbub harus ikut beberapa kali pindah dari Jakarta ke Solo karena adanya pertempuran fisik antara Belanda dan para pejuang Indonesia. Mahbub menghabiskan masa kecilnya di kampung Kauman Solo, beliau bergaul dengan anak-anak kampung dan bahkan sering bermain bola dengan raja Solo.

Mahbub Djunaidi memiliki hobi menulis, kegemarannya menulis sudah di asah ketika beliau masih kecil, beliau diperkenalkan oleh gurunya karya-karya modern seperti karyanya Sutan Takdir Alisjahbana, Karl Mark dll. Kegemarannya menulis terus dikembangkan sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang penulis dengan ciri khas tersendiri. Banyak karya-karya sastra yang dihasilkan oleh Mahbub Djunaidi. Mahbub pernah mengaku lebih menyukai sastra daripada jurnalistik. Dalam urusan menulis, beliau pernah berstatment bahwa “*saya akan terus menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis*”. Dari ungkapan Mahbub tersebut menunjukkan sikap yang sangat tegas dalam urusan tulis menulis. Dengan tulisan beliau yang mempunyai gaya

khas yang tidak dimiliki oleh penulis lain itulah beliau mendapat julukan “Sang Pendekar Pena”.

c. Kritik Mahbub Djunaidi di Masa Orde baru

Mengkritik demokrasi di Indonesia, di antaranya sistem otoriter dan represif yang dipraktikkan oleh Orde Baru, serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Potret demokrasi bagi Mahbub Djunaidi, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan rakyat (DPR) saja. Oleh karenanya, Mahbub Djunaidi tegas mengatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan idealnya, anggaran negara harus dialokasikan dan diperuntukkan atas kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konstruksi sosial-politik pemikiran Mahbub Djunaidi dapat digambarkan melalui proses *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amien Rais tentang Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- As'ad, Ali, Said, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*, (Jakarta: LP3ES, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 1988).
- Azhar, Anas, Anang, *Komunikasi Politik untuk Pencitraan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017).
- Azyumardi, Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003).
- Djunaidi, Mahbub, *Asal Usul*, (Yogyakarta: Ircisod, 1996).
- Djunaidi, Mahbub, *Dari Hari ke Hari*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1975).
- Djunaidi, Mahbub, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).
- Djunaidi, Mahbub, *Politik Tingkat Tinggi Kampus*, (Malang. Literasi Nusantara, 2017).
- Farhan, *Mahbub Djunaidi: Aktivis Politik Nahdlatul 'ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008)
- Fauzan, Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2015)
- Feillard, Andree, *NU Vis – a – Vis Negara*, (Yogyakarta: Basabasi, 2017).
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Harahap, Idris, Mardian, *Ulama dan Politik*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2020).

- Hermawan, Muh, Ibnu, Nurdin, *Sang Pujanggab telah pergi Harian* (Republika Jum'at 29 juli 2005)
- Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mabbub Djunaidi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran dan Praktek dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983).
- Marijan, Kacung *Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Pustaka: Eureka 2006).
- Muhammad Iqbal, Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Masa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013).
- Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017).
- Muhammad, Fajrul, Falaakh, *Citra Diri PMII*, (Yogyakarta; Yayasan Putra Nusantara, 1988)
- Poloma, M. Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU, Sejarah-istilah, Amaliyah-Uswah*. (Surabaya: Khalista, 2007).
- Sularta, *Soekarno dalam dialog dengan sejarah Soekarno seratus tahun*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001)